

## PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA SEBELUM DAN SELAMA MASA PANDEMI COVID - 19

Rizkis Hamdigam

hrizkis@gmail.com

Dr. Akhmad Riduwan, S.E., M.S.A., Ak., CA.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research focuses on Local-owned Source Revenue in Surabaya in 2018-2021. The research aimed to examine the difference between Local-owned Source Revenue in Surabaya before and after the pandemic of Covid-19. The time limit before the pandemic of Covid-19 was in the 2018-2019 periods. Moreover, the time limit during the pandemic of Covid-19 was 2020-2021. The research was quantitative. Furthermore, the research focused on one variable (Local Own Source) in Surabaya for four years of observation. The first two years before the pandemic of Covid-19 that was in 2018-2019. Meanwhile, the next two years were during the Covid-19 pandemic which was from 2020-2021. Furthermore, the instrument used files documentation taken from Bapenda Surabaya. Additionally, the data analysis technique used descriptive and paired t- test samples. The result indicated that there was a significant difference between Local- owned Source Revenue in Surabaya before and during the pandemic. However, descriptively the amount of Local-owned Source Revenue in Surabaya before the pandemic of Covid-19, i.e 2018 to 2019 was higher than during the pandemic of Covid-19, i.e. 2020 until 2021.*

*Keywords: local own sources, pandemic, covid-19*

### ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya tahun 2018-2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan PAD Kota Surabaya pada sebelum dan saat pandemi Covid-19, batasan waktu yang digunakan sebelum pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018-2019, sedangkan batasan waktu yang ditetapkan ketika terjadi pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dalam penelitian difokuskan pada satu variabel yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Surabaya dengan pengamatan selama 4 tahun yang dibagi pada 2 tahun sebelum terjadi pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018 dan tahun 2019, sedangkan 2 tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai tahun saat terjadi masa pandemi Covid-19. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi melalui arsip dari Bapenda Kota Surabaya. Teknik analisis data menggunakan deskriptif dan *paired sampel t-test* untuk menguji perbedaan PAD antara sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan PAD Kota Surabaya pada sebelum dan saat pandemi Covid-19, meskipun demikian secara deskriptif diketahui bahwa jumlah PAD di Kota Surabaya sebelum pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018 hingga tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah PAD di Kota Surabaya saat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga tahun 2021.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, pandemi, covid-19

### PENDAHULUAN

Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dan termasuk salah satu wilayah industri dan pendidikan di Provinsi Jawa Timur, namun perekonomian di Surabaya sempat meredup karena adanya virus Covid-19 pada awal tahun 2020, hal ini disebabkan adanya pemutusan akses semua kegiatan. Sebagai wilayah yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan memiliki peran besar sebagai wilayah penghubung baik antara daerah di Jawa Timur ataupun antara daerah di Indonesia melalui sarana pelabuhan yang terdapat di Kota Surabaya, namun dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak pada pembatasan

transportasi berdampak besar pada perekonomian di Kota Surabaya (Sitepu, 2017). Berkaitan dengan hal itu, setiap daerah tentunya mempunyai sumber daya masing-masing yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya agar semakin baik. Dalam struktur pendapatan daerah, salah satu sumber penerimaan yang menunjukkan indikasi kemandirian suatu daerah dalam aspek perekonomian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sektor tersebut memiliki peran yang strategis serta sumber utama penerimaan, hal ini berkaitan pula dengan otonomi daerah yang memberikan kewenangan berupa kebijakan desentralisasi yang membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Sehingga pemerintah berupaya menemukan sumber pendapatan yang potensial juga pengoptimalan sumber pendapatan yang dipungut sebelumnya. Peningkatan pembangunan ekonomi akan tergantung pada keterlibatan pemerintah yang berupa dukungan untuk masyarakat sehingga mengalami kemajuan perekonomian di daerah tersebut. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian turun tentunya akan mempengaruhi PAD, dengan demikian pemerintah daerah harus melakukan upaya penanganan akibat penurunan ini. Misalnya saja dengan memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikurangi dan merombak strukturnya yaitu dengan mengatur ulang fokus belanja dengan baik (Priyantono, 2021).

Fenomena berupa Covid-19 di Kota Surabaya sangat berdampak pada perekonomian di Kota Surabaya, hal ini bisa dilihat dari sajian data yang disampaikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa terdapat penurunan PAD di Kota Surabaya yaitu pada tahun 2019 yang memiliki PAD sebesar Rp.5.381,92 milyar turun menjadi Rp.4.829,96 milyar. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2019 merupakan tahun sebelum terjadinya pandemi covid-19, sedangkan pada tahun 2020 merupakan masa saat terjadinya pandemi Covid-19, berdasarkan penjelasan tersebut maka diindikasikan adanya dampak dari pandemi Covid-19 dalam penurunan PAD di Kota Surabaya tersebut. Namun meskipun terlihat terdapat perbedaan pada grafik tersebut, belum bisa dipastikan bahwa perbedaan tersebut signifikan. Selain itu, penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui sektor yang mengalami penurunan dan sektor yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Surabaya.

Kajian empiris tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian yang dilakukan oleh Siregar (2021) yang menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 yang masih merebak di dunia termasuk di Indonesia membuat hampir seluruh sektor terganggu aktivitasnya terlebih sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Tingginya angka kematian dan angka pengangguran menyebabkan tingginya angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Lonjakan anggaran negara yang berbanding terbalik dengan melemahnya rupiah membuat Indonesia hampir dihadapkan dengan resesi. Ditambah dengan aturan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Berskala Besar (PSBB), *Work from Home* (WFH) dan *School Home* guna pemutusan rantai penyebaran Covid-19 mengharuskan semua orang mematuhi aturan untuk tetap dirumah saja. Salah satu dampak dari sistem tersebut adalah banyaknya ketenagakerjaan yang hilang sedangkan mereka tetap membutuhkan pekerjaan agar bisa mendapatkan penghasilan meskipun dengan kondisi yang demikian.

Merunut pada kajian empiris dan fenomena berupa penurunan PAD di Kota Surabaya pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian secara mendalam tentang dampak dari pandemi Covid-19 terhadap PAD di Kota Surabaya dengan cara membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya pada sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018 dan tahun 2019 dengan PAD saat pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini difokuskan pada judul tentang "Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19".

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa PAD terdiri dari beberapa aspek yaitu: Pertama, Pajak Daerah Pajak Daerah menurut UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah menurut Renaningsih (2015) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, dan pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah

Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam pelaksanaan desentralisasi keuangan daerah, jenis-jenis pajak dibedakan atas pajak daerah yang dipungut provinsi dan yang dipungut kabupaten / kota. Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut provinsi (Mardiasmo, 2018) yaitu: 1.) Pajak kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air (PKB-KAA) dengan tarif 5%. 2.) BBNKB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan KAA (kendaraan diatas Air) dengan tariff 10%. 3.) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan tarif 5%. 4.) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP) dengan tarif 20%.

Jenis-jenis Pajak pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yaitu pajak hotel dengan tarif 10% dan pajak restoran dengan tarif 10% serta pajak hiburan dengan tarif 35%, pajak reklame dengan tarif 25%, pajak penerangan jalan dengan tarif 10%, pajak pengambilan bahan galian Gol. C dengan tarif 20% dan pajak parkir dengan tarif 20%.

Kedua, Retribusi, Berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/ badan. Besar dan jenis retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Beberapa aspek termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah 1.) retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan. 2.) Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah: retribusi selain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar, tempat hiburan / rekreasi, vila, pesanggrahan dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

Sementara itu beberapa aspek yang termasuk dalam lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga dan Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta komisi yang merupakan potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah (Saputro, 2014).

### **Peran Akuntansi Sektor Publik**

Setiap negara memiliki Akuntansi Sektor Publik (ASP), sistem yang mengelola dan memberikan informasi tentang transaksi keuangan, aset, dan catatan pemerintah. Akuntansi, pembukuan, pencatatan, dan pelaporan diperlukan untuk pengambilan keputusan, kontrol, dan transparansi yang efektif. Informasi yang tepat waktu, akurat, dan memadai tentang arus pendapatan dan pengeluaran memperkuat kapasitas pemerintah untuk memutuskan dan mengontrol total anggaran. Ini juga membantu dalam pengelolaan keberlanjutan fiskal jangka

panjang dan keterjangkauan kebijakan. Sistem akuntansi publik yang tepat memastikan bahwa pemerintah dapat memenuhi pembayaran (Martani dan FEUI, 2014).

Namun, tingkat akurasi, ketepatan waktu, dan transparansi bervariasi. Beberapa sistem akuntansi publik sangat canggih, komprehensif, terdigitalisasi, dan sulit dimanipulasi. Yang lain dapat dikendalikan oleh beberapa pejabat di atas aparatur negara dan belum sempurna, berbasis uang tunai dan berdasarkan prinsip uang masuk uang. Akuntansi kreatif dan penipuan murni dimungkinkan di sebagian besar sistem. Namun, semakin sederhana sistemnya, semakin banyak manipulasi dan campur tangan yang mungkin terjadi dan dapat didorong oleh kepentingan politik. Tetapi bahkan sistem canggih tidak kebal terhadap penipuan dan penipu terampil dapat menyedot sejumlah besar uang (Sopannah *et al.*, 2020).

Transparansi adalah masalah inti Akuntansi Sektor Publik (ASP). Pemerintah harus memutuskan sejauh mana akan terbuka dan apakah mereka akan mempublikasikan laporan keuangan dan membuat keuangan pemerintah transparan. Akses ke informasi akuntansi tidak hanya memberi pemerintah kesempatan untuk pengambilan keputusan keuangan dan manajerial yang lebih terinformasi, tetapi juga mengurangi kemungkinan korupsi. Tanpa informasi fiskal yang baik, pemerintah tidak dapat memahami risiko fiskal yang mereka hadapi atau membuat keputusan anggaran yang baik. Oleh karena itu, transparansi fiskal merupakan dasar dari pengelolaan fiskal yang efektif (Amani, 2021).

Standar akuntansi berusaha untuk membuat informasi keuangan transparan, mengurangi risiko bahwa mereka yang memiliki kekuatan politik atau birokrasi bertindak dengan cara yang tidak etis, ilegal, mementingkan diri sendiri dan tidak pantas. Semua departemen dan kementerian di bawah pemerintah nasional dan kabupaten diwajibkan oleh hukum untuk melakukan semua transaksi yang melibatkan dana publik melalui sistem ini. Terdapat empat kriteria kualitas dasar dalam akuntansi public yaitu ketepatan waktu, keteraturan rekonsiliasi, pelaporan rekening, ketersediaan informasi sumber daya yang diterima oleh unit penyampaian layanan, kualitas laporan anggaran dalam tahun, serta kualitas dan ketepatan waktu laporan keuangan tahunan (Meliala *et al.*, 2007).

### **Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sektor UMKM**

Soetjipto (2020) menyatakan bahwa korban utama wabah COVID-19 adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar, biasanya tidak memiliki sumber daya yang cukup, terutama keuangan dan manajerial, dan tidak siap untuk gangguan tersebut kemungkinan akan berjalan lebih lama dari yang diharapkan. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini sangat bergantung pada transaksi bisnis rutin mereka dan sejumlah kecil pelanggan. Oleh karena itu, banyak UMKM kehabisan cadangan modal hingga beberapa hampir tidak terus beroperasi. UMKM adalah tulang punggung banyak ekonomi di seluruh dunia yang memberikan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja bagi sejumlah besar orang di seluruh dunia. Selain itu, tidak tersedianya tenaga kerja, perlambatan produksi, kekurangan bahan baku, dan pembatasan transportasi akan memiliki konsekuensi besar pada bisnis UMKM. Pada gilirannya, akan memiliki dampak signifikan pada ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, respons kebijakan yang kuat juga penting untuk mengimbangi efek negatif dari wabah saat ini (Nugraheni *et al.*, 2020).

Selanjutnya menurut Wijoyo (2021) dinyatakan bahwa dalam sebuah kajian oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa bisnis khususnya sektor UMKM mengalami penurunan permintaan yang cukup tajam akibat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Temuan tersebut dikonfirmasi oleh Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) Bank Indonesia yang memberikan gambaran umum tentang industri manufaktur yang ada dan yang diprediksi kondisi untuk kuartal saat ini dan masa depan. PMI-BI adalah indeks komposit yang dibangun dari lima indeks lainnya: volume barang input, volume produksi atau output, kesempatan kerja, waktu pengiriman dari pemasok dan persediaan. Sebagai

respon terhadap kerentanan sektor UMKM saat masa pandemi Covid-19, maka pemerintah melakukan beberapa strategi misalnya berupa penguatan bantuan keuangan pada pelaku UMKM. Hal ini sesuai dengan penyampaian Aisyah (2020) bahwa Segera setelah merebaknya pandemi COVID-19, banyak pemerintah mulai memperluas bentuk dukungan keuangan dan lainnya kepada UMKM dan pekerja mereka karena perusahaan kecil lebih rentan terhadap guncangan negatif terhadap rantai pasokan, pasokan tenaga kerja, dan permintaan akhir untuk barang dan jasa daripada perusahaan besar. Karena UMKM beragam, bagaimanapun tingkat keparahan dampak pandemi pada mereka sangat bervariasi tergantung pada karakteristik mereka. Selain itu, pada sisi UMKM sendiri mulai ikut serta dalam dalam perdagangan online dan mencoba untuk menentukan bagaimana penggunaan perdagangan online dan pekerjaan mereka terkait dalam masa pandemi Covid-19.

### **Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pajak**

Pengeluaran pemerintah telah meningkat secara signifikan karena upaya pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan dan peralatan keselamatan, untuk membiayai penelitian, untuk membayar tunjangan pengangguran dan memberikan dukungan keuangan kepada sektor-sektor yang terkena dampak parah seperti pariwisata dan transportasi udara. Krisis ekonomi sebelumnya, krisis keuangan 2008-2010, telah berdampak signifikan pada pengumpulan pendapatan pajak di UE. Menurut Eurostat, total pendapatan rata-rata dari pajak dan kontribusi sosial menurun sebesar 5,6% pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 dan baru pada tahun 2011 pendapatan pajak rata-rata di UE mencapai tingkat yang melebihi yang dari tahun sebelumnya hingga awal krisis keuangan. Kesimpulannya, dua-tiga tahun diperlukan bagi negara-negara anggota UE untuk pulih dari dampak krisis keuangan. Karena krisis kesehatan saat ini masih berlangsung, mungkin perlu waktu lebih lama bagi ekonomi UE untuk pulih kali ini (Marlina, 2020).

Apalagi krisis ekonomi saat ini sangat berbeda dengan krisis keuangan 2008-2010. Salah satu perbedaan utama yang perlu digarisbawahi adalah dampaknya terhadap tingkat pengangguran. Krisis keuangan tahun 2008 menyebabkan resesi ekonomi yang disertai dengan meningkatnya tingkat pengangguran, seperti yang diharapkan. Tetapi tingkat pengangguran rata-rata untuk EU-27, menurut OECD, hanya meningkat sebesar 2% pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008. Dampak krisis saat ini terhadap tingkat pengangguran diperkirakan akan jauh lebih tinggi. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa prediksi tingkat pengangguran dimasukkan dalam penelitian saat ini (Saputra, 2022).

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai barometer untuk dampak sosial pandemi, mengingat lonjakan cepat dalam jumlah pengangguran. Harapannya adalah bahwa tingkat pengangguran akan mencapai tingkat yang akan sebanding. Selain itu, perkiraan mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan para penganggur untuk mencari pekerjaan baru juga pesimis. Penerimaan pajak diprediksi akan turun drastis dan penelitian saat ini akan mencoba menggunakan teknik peramalan untuk menilai kemungkinan dampak pandemi pada pengumpulan pendapatan pajak (Ikraith, 2021). Metode estimasi penerimaan pajak datang dalam berbagai bentuk dan ukuran: model tren sederhana, peramalan deret waktu, simulasi, model regresi, peramalan penilaian ahli, peramalan konsensus. Sering kali, pemerintah pusat dan daerah akan menggunakan kombinasi beberapa metode ketika memperkirakan pendapatan pajak atau mereka akan menggunakan metode yang berbeda untuk berbagai kategori pajak. Pramardika (2017) menggaris bawahi peran agenda politik dalam prediksi penerimaan pajak yang melengkung ketika pembuat kebijakan berjuang dengan ketidakpastian hasil anggaran dari setiap keputusan yang mungkin mereka sepakati. Ria (2022) menunjukkan bukti kemungkinan manipulasi pemerintah memiliki efek positif yang signifikan pada keakuratan perkiraan penerimaan pajak menggunakan data dari negara-negara OECD tertentu. Penelitian tambahan tentang pengaruh politik pada prakiraan

penerimaan pajak menunjukkan bahwa, meskipun peramalan konsensus dapat membantu mengurangi pengaruh faktor politik, ada sedikit bukti peningkatan akurasi keseluruhan prediksi penerimaan pajak ketika peramalan konsensus digunakan (Utomo, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, hal ini karena penelitian ini menggunakan data berupa numerik atau angka berupa nominal atau besaran PAD Kota Surabaya pada setiap sektornya. Kemudian penelitian yang sistematis menggunakan analisis data statistik juga menjadi alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif ini. Selain itu, pendekatan yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis komparasi, yaitu teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. penggunaan teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Pola penelitian ini adalah membandingkan satu variabel dengan sampel yang berbedar, atau penelitian dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena. Perbandingan yang dimaksud tersebut berupa membandingkan PAD di Kota Surabaya.

### **Gambaran Objek Penelitian**

Objek penelitian ini difokuskan pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kota Surabaya yang terdiri dari beberapa komponen atau sektor yaitu sektor pendapatan pajak daerah, sektor pendapatan retribusi daerah, sektor pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sektor hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

### **Periode Observasi**

Periode atau jangka waktu observasi merupakan rentang waktu data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rentang waktu yang dimulai pada tahun 2018 hingga tahun 2021 yang diperoleh pada website resmi yaitu [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dan dari BKD Kota Surabaya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dokumentasi. Hal ini karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yaitu dari Badan Keuangan Daerah Kota Surabaya. Teknik dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara mengamati arsip atau data yang sudah disediakan oleh BKD Kota Surabaya berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintahan Kota Surabaya tahun 2018-2021.

### **Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian difokuskan pada satu variabel yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Surabaya dengan pengamatan selama 4 tahun yang dibagi pada 2 tahun sebelum terjadi pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018 dan tahun 2019, sedangkan 2 tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai tahun saat terjadi masa pandemi Covid-19.

### **Definisi Operasional**

Johannes (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut pihak daerah berdasarkan peraturan daerah yang selaras pada aturan perundangundangan yang ada. Pengamatan PAD memiliki beberapa sektor yaitu sektor pendapatan pajak daerah, sektor pendapatan retribusi daerah, sektor pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sektor hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. PAD dalam penelitian ini merupakan PAD di Kota

Surabaya pada tahun 2018-2021.

### **Teknik Analisis data**

#### **Deskriptif Kuantitatif**

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjabarkan tentang kondisi setiap sektor dalam PAD baik saat terjadi pandemi Covid-19 serta selama terjadinya pandemi Covid-19, deskripsi tersebut nantinya akan dimuat dalam sajian tabel dan grafik sehingga bisa dilihat secara visual mengenai beberapa sektor yang mengalami penurunan saat pandemi Covid-19. Penggunaan analisis deskriptif kuantitatif tersebut akan memberikan gambaran mengenai sektor PAD yang mengalami penurunan pendapatan pada saat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga rumusan masalah dan tujuan pertama dalam penelitian ini bisa dijelaskan melalui analisis deskriptif kuantitatif.

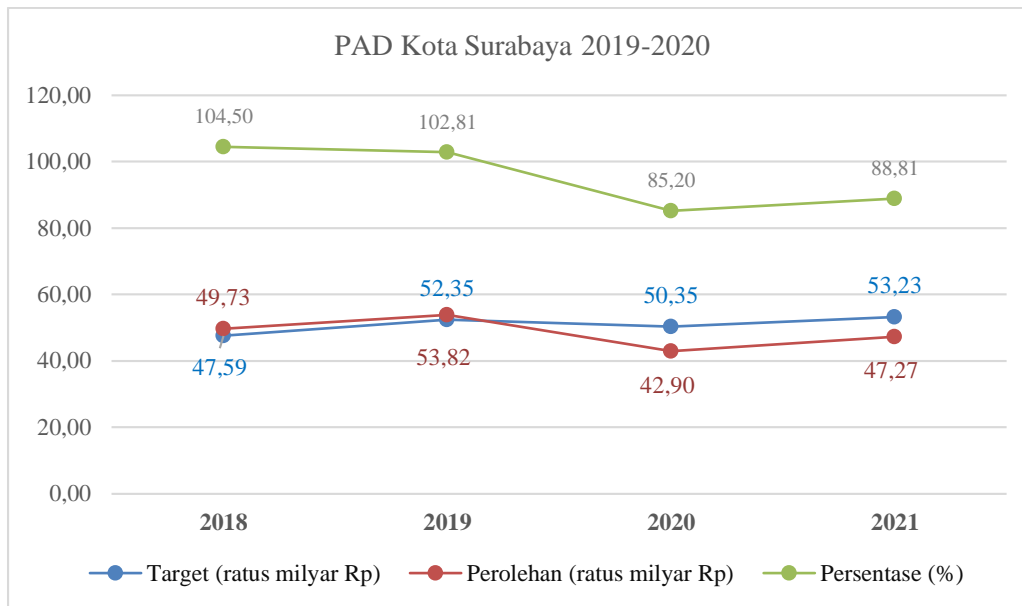
#### **Paired Sampel T-Test**

Teknik analisis komparasi yang digunakan yaitu analisis *paired sampel t-test*, yang merupakan pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean dari dua sampel yang berpasangan berasal dari subjek yang sama, setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Uji *Paired Sample T Test* menunjukkan apakah sampel berpasangan mengalami perubahan yang signifikan atau nyata. Hasil uji *Paired Sample T Test* ditentukan oleh nilai signifikansinya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian yaitu nilai signifikansi (2-tailed)  $< 0.05$  menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel, dan nilai signifikansi (2-tailed)  $> 0.05$  menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

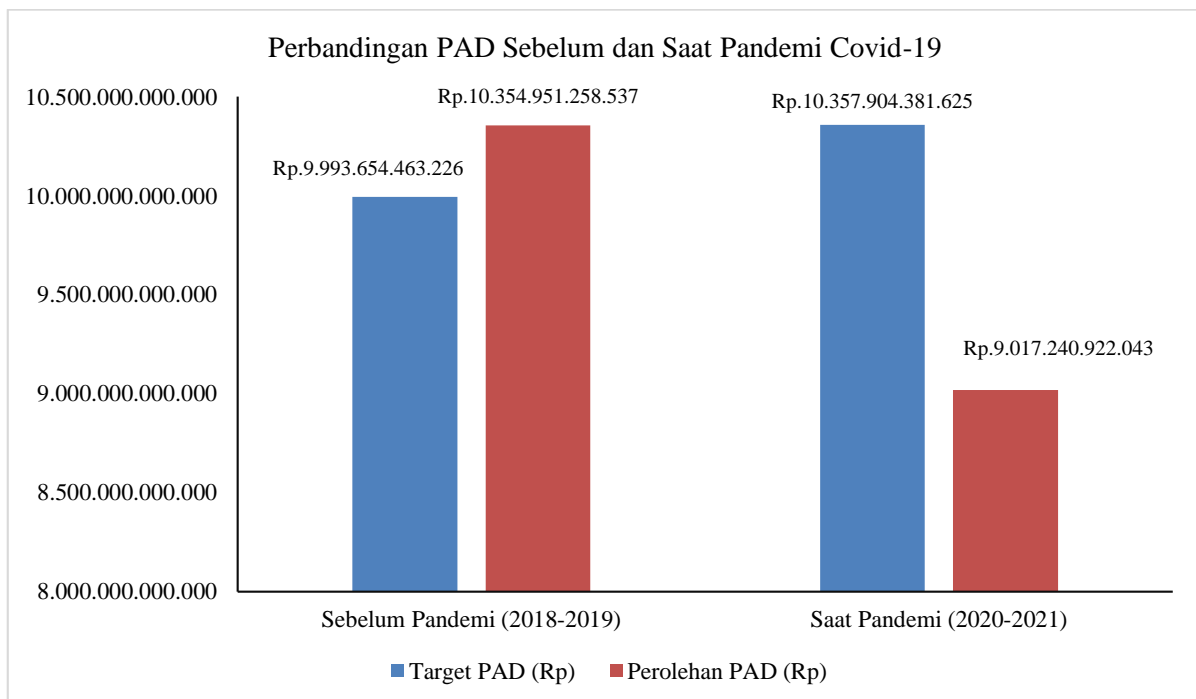
### **Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif dalam penelitian ini berupaya menjabarkan perbedaan PAD di Kota Surabaya sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan saat terjadinya pandemi Covid-19 yang dibatasi pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Untuk mengetahui perbedaan PAD di Kota Surabaya tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



**Gambar 1**  
**PAD Kota Surabaya Tahun 2018-2021**  
**Sumber: Bapeda Kota Surabaya (2022)**

Pada Gambar 1 tersebut, maka diketahui bahwa terdapat penurunan persentase perolehan PAD Kota Surabaya terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, penurunan tersebut terlihat pada tahun 2020 yang sebelumnya memiliki pencapaian target 102,81% pada tahun 2019 menjadi 85,20% pada tahun 2020. Penurunan tersebut juga terlihat pada perolehan PAD pada tahun 2020 dari Rp.4.289.960.292.373 dari yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar Rp.5.381.920.253.810 atau mengalami penurunan sebesar Rp.1.091.959.961.437. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan antara PAD di Kota Surabaya sebelum terjadi pandemi Covid-19 dan saat terjadi pandemi Covid-19 dijabarkan pada Gambar 2 berikut.



**Gambar 2**  
**PAD Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19**  
**Sumber: Bapeda Kota Surabaya (2022)**



Berdasarkan pada Gambar 2 tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara PAD di Kota Surabaya sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yang dibatasi tahun 2018 hingga tahun 2019 dan saat terjadi pandemi Covid-19 yang dibatasi pada tahun 2020 hingga 2021, perbedaan tersebut bisa diketahui dari perbedaan perolehan PAD yang terjadi penurunan jumlah PAD saat terjadinya pandemi Covid-19 yaitu sebesar Rp.9.017.240.922.043 yang merupakan jumlah PAD tahun 2020 dan tahun 2020, sedangkan PAD sebelum pandemi Covid-19 di Kota Surabaya memiliki jumlah PAD sebesar Rp.10.354.951.258.537 yang merupakan jumlah PAD tahun 2018 dan tahun 2019, sehingga diketahui terdapat penurunan jumlah PAD sebesar Rp.1.337.710.336.494.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis paired sample t test untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara PAD sebelum Covid-19 di Kota Surabaya dan PAD saat terjadi Covid-19 secara statistik. Kriteria pengambilan keputusan dalam penelitian merujuk penyampaian dari (Tax 2020,) bahwa jika nilai signifikansi (Probability value)  $\leq$  alpha 5% (0,05) maka dinyatakan bahwa antar kelompok terdapat perbedaan yang signifikan, namun jika nilai signifikansi (Probability value)  $>$  alpha 5% (0,05) maka dinyatakan bahwa antar kelompok tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Uraian tentang hasil *paired sample t test* dijabarkan pada Tabel 1 berikut.

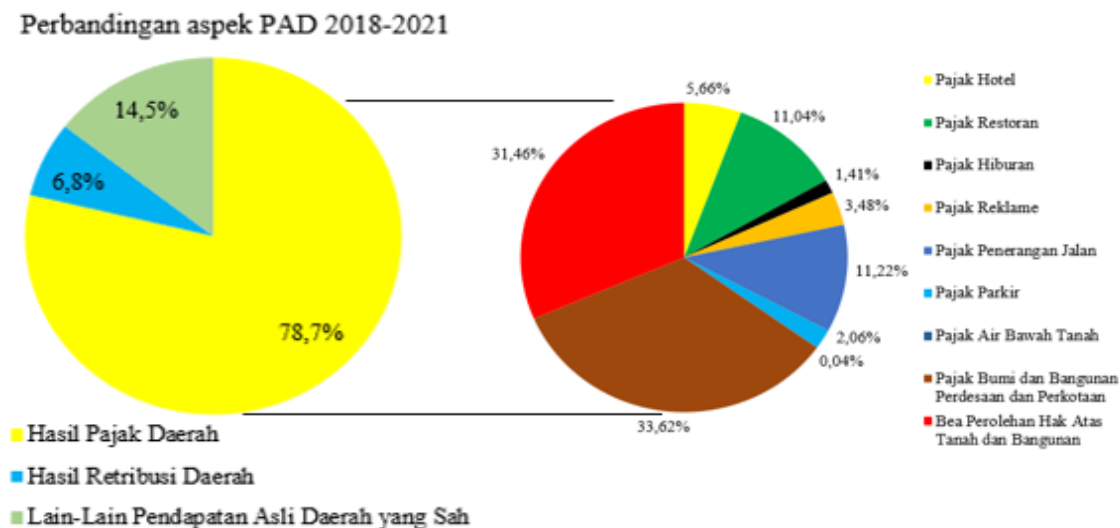
Tabel 1  
Hasil Analisis Paired Sample T-test

No.	Kelompok	Rata-rata	Signifikansi
1.	PAD sebelum Covid-19	188.271.841.064	
2.	PAD saat Covid-19	163.949.834.946	0,486

Sumber: Data diolah (2022)

### Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data tersebut diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara PAD Kota Surabaya sebelum dan saat pandemi Covid-19, hal ini membuktikan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi di Kota Surabaya dan regulasi pembatasan (PSBB) yang berlaku di Kota Surabaya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan PAD di Kota Surabaya. Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 di Kota Surabaya tetap memberikan dampak penurunan terhadap PAD di Kota Surabaya yang nampak pada tahun 2020. Tidak adanya dampak yang signifikan dari pandemi Covid-19 di Kota Surabaya terhadap PAD di Kota Surabaya pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan struktur PAD di Kota Surabaya yang masih didominasi oleh perolehan pajak daerah, hal ini dapat dilihat pada persentase dalam Gambar 3 berikut.



Gambar 3  
Persentase Aspek PAD Kota Surabaya Tahun 2018-2021  
Sumber: Bapeda Kota Surabaya (2022)

Persentase terbesar dalam struktur PAD di Kota Surabaya tahun 2018-2021 adalah hasil pajak daerah, selanjutnya sub aspek terbesar dalam pajak daerah terdiri dari dua sub aspek penyusun pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta sub aspek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini sejalan dengan beberapa kajian empiris yang dilakukan oleh Oktasa (2020) yang menyatakan bahwa pajak memiliki peran penting dalam stimulus perekonomian di masa pandemi Covid-19, pemerintah berharap insentif pajak dapat mendorong daya beli masyarakat yang terganggu dan cenderung menurun, membantu arus kas untuk aktivitas perusahaan, dan membantu pemenuhan kebutuhan impor atas bahan baku produksi. Urgensi pajak sebagai aspek penting dalam pemulihan ekonomi saat pandemi juga disampaikan oleh Ria (2022) yang menyatakan bahwa pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam APBN, namun juga memegang peranan penting dalam upaya menjaga dan pemulihan ekonomi. Pajak harus dapat berperan besar dalam memberikan stimulus secara menyeluruh terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di masa pandemi. Pajak memegang peranan krusial di dalam APBN dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Hal ini tercermin dari kontribusi pajak yang semakin meningkat pada sektor penerimaan negara. Namun demikian, di masa pandemi ini dimana aktivitas ekonomi terdisrupsi cukup dahsyat, penerimaan pajak mengalami terkontraksi.

Berbagai tren struktural jangka panjang berdampak pada fungsi ekonomi dan masyarakat di seluruh dunia. Tren struktural termasuk pertumbuhan produktivitas yang melambat, percepatan digitalisasi, otomatisasi dan kecerdasan buatan, meningkatnya ketidaksetaraan, penuaan populasi, perubahan yang timbul dari globalisasi dan mobilitas, perubahan iklim dan degradasi lingkungan dan meningkatnya risiko kesehatan. Beberapa dari tren ini saling terkait, dan sebagian besar telah dipengaruhi dalam beberapa cara oleh krisis Covid-19. Tren-tren tersebut menurut Tarigan (2022) dapat mempengaruhi keuangan publik dalam banyak hal secara langsung melalui perubahan jumlah wajib pajak dan penerima manfaat, seperti yang disebabkan oleh penuaan populasi dengan mempengaruhi prioritas kebijakan di lingkungan pasca-krisis dan berdampak pada berbagai instrumen kebijakan pajak dan pengeluaran yang tersedia bagi pembuat kebijakan.

Strategi keuangan publik yang berwawasan ke depan harus mempertimbangkan tren ini dengan cermat. Strategi fiskal harus menilai kembali prioritas pajak dan pengeluaran dan instrumen mana yang paling efektif dalam mencapai tujuan negara-negara mengingat

perubahan struktural ini, baik sekarang maupun saat mereka berkembang di masa depan. Perekonomian daerah termasuk di Kota Surabaya tentunya akan berkaitan dengan pemulihan ekonomi global, upaya untuk pemulihan ekonomi nasional dan global perlu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan mengalihkan perhatiannya pada pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana mengelola keuangan publik mereka melalui pemulihan dan di luar krisis kesehatan. Hal ini sejalan dengan penyampaian Inzaghi (2020) bahwa agar pemulihan menjadi inklusif dan berkelanjutan, baik ditingkat daerah ataupun tingkat nasional perlu mempertimbangkan sektor dan demografi yang paling terpengaruh oleh krisis dan mengembangkan strategi khusus yang menempatkan kelompok-kelompok ini sebagai pusat upaya pemulihan.

Krisis Covid-19 telah menyebabkan penurunan besar dalam keuangan publik, sehingga langkah-langkah penahanan, peningkatan pengeluaran pemerintah, dan penerimaan pajak yang lebih rendah telah mendorong peningkatan defisit anggaran dan utang pemerintah, yang sebagai persentase dari PDB telah mencapai tingkat tertinggi selama beberapa dekade terakhir. Sementara imbal hasil obligasi yang rendah saat ini di banyak negara, didukung oleh kebijakan moneter yang akomodatif, menurut Pangestu (2022) hal ini akan membantu menjaga pembayaran bunga utang negara pada tingkat yang dapat dikelola, mempertahankan utang yang tinggi meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan suku bunga dan perlambatan pertumbuhan, dan meningkatkan risiko perputaran utang. Memulihkan keuangan publik kemungkinan akan terus menjadi prioritas bagi daerah dan negara selama bertahun-tahun ke depan. Selain dampak pandemi terhadap keuangan publik, negara-negara sudah menghadapi banyak tantangan struktural jangka panjang. Mereka termasuk perubahan iklim, penuaan populasi, percepatan digitalisasi dan otomatisasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya ketidaksetaraan. Sementara pandemi mungkin untuk sementara mengalihkan fokus dari banyak tantangan lama ini, krisis Covid-19 juga telah mengekspos sejumlah kelemahan struktural yang sudah ada sebelumnya, seperti meningkatnya ketidaksetaraan, jaring pengaman sosial yang tidak memadai, dan akses yang tidak setara ke perawatan kesehatan dan infrastruktur digital (Laila, 2022).

Bekti (2018) menyampaikan bahwa penerimaan pajak dapat didukung melalui perubahan pada sistem pajak, seperti menyesuaikan tarif pajak, memperluas basis pajak dan mengubah bauran pajak, mereka juga dapat ditambah dengan reformasi struktural yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan, pada gilirannya, basis pajak yang lebih besar, misalnya, melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, dan reformasi di pasar tenaga kerja dan produk. Pada sisi yang lain dari aspek pengeluaran, tinjauan pengeluaran dapat membantu negara-negara memilih prioritas, mengidentifikasi area untuk penghematan dan peningkatan efisiensi dengan mengurangi pengeluaran prioritas rendah atau tidak efektif, dan membebaskan sumber daya untuk bidang kebijakan prioritas. Periode berkelanjutan dari pertumbuhan ekonomi yang rendah merusak pendapatan pajak dan membuatnya sulit untuk mengatasi tekanan pengeluaran, mempertahankan keberlanjutan utang publik, dan secara lebih umum meningkatkan standar hidup penduduk. Pertumbuhan produktivitas telah menurun di sebagian besar negara dan daerah selama beberapa dekade terakhir. Kemungkinan penyebab perlambatan ini termasuk, di antara faktor-faktor lain, keuntungan yang mengecewakan dari gelombang inovasi baru-baru ini, kemungkinan karena sampai batas tertentu untuk biaya penyesuaian dan difusi yang tidak memadai dari teknologi dan inovasi baru di seluruh perusahaan; penurunan dinamisme bisnis dan realokasi sumber daya; dan perataan pencapaian Pendidikan (Sugiarto, 2019).

Pada kasus krisis Covid-19, gangguan dalam pendidikan cenderung mengurangi keterampilan, produktivitas, dan pendapatan siswa saat ini, dengan kemungkinan efek negatif pada PDB di masa depan (Prasetyaningtyas, 2022). Pengurutan reformasi akan sangat penting untuk membantu pemulihan ekonomi mendapatkan daya tarik, yang menyiratkan dimulai dengan reformasi yang tidak mengurangi permintaan agregat dalam waktu dekat dan

bekerja sangat baik dalam periode kelonggaran ekonomi (Putri dan Ma'ruf, 2022). Reformasi tersebut termasuk menurunkan hambatan peraturan untuk masuk dalam layanan profesional atau memperkuat kebijakan pasar tenaga kerja aktif dan memperluas akses ke pengasuhan anak dan tunjangan keluarga untuk mempromosikan partisipasi angkatan kerja. Meningkatkan aktivasi dan perolehan keterampilan, serta memfasilitasi persaingan dan masuk dan keluarnya bisnis, juga akan meningkatkan peluang pasar tenaga kerja untuk semua dan membantu mendorong realokasi yang meningkatkan produktivitas (Naimuni, 2021).

Kebijakan fiskal perlu beradaptasi dengan dunia digitalisasi, yang memberlakukan tekanan dan kendala baru pada sistem perlindungan sosial dan basis pajak penghasilan. Meningkatkan konektivitas broadband, membantu perusahaan untuk mengembangkan model bisnis online, meningkatkan akuisisi keterampilan digital, dan memastikan pembayaran online dan privasi data yang aman, adalah semua bidang reformasi yang akan membantu mendorong transformasi digital dan memastikan bahwa rumah tangga yang lebih miskin, perusahaan kecil, dan daerah terpencil juga memiliki akses dan dapat memperoleh manfaat (Maharani, 2021).

Sehingga dengan adanya digitalisasi memberikan peluang bagi kemajuan yang dapat dan harus dimanfaatkan oleh kebijakan fiskal, karena akan membutuhkan investasi dalam infrastruktur dan keterampilan, sambil memungkinkan administrasi publik yang lebih efisien dan kepatuhan pajak yang ditingkatkan misalnya berupa *big data* misalnya semakin banyak digunakan oleh administrasi pajak untuk memerangi penipuan pajak. Peningkatan ketidaksetaraan dalam negara maju sebagian disebabkan oleh otomatisasi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi distribusi pendapatan pasar, ketidaksetaraan peluang dan sistem pajak dan transfer yang kurang efektif dari perspektif redistribusi (Aprilia, 2019).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya sebelum dan selama masa pandemi Covid-19, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan PAD Kota Surabaya pada sebelum dan saat pandemi Covid-19, meskipun demikian secara deskriptif diketahui bahwa jumlah PAD di Kota Surabaya sebelum pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018 hingga tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah PAD di Kota Surabaya saat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga tahun 2021.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang bisa menjadi pertimbangan pembaca untuk memahami hasil dalam penelitian ini, beberapa keterbatasan tersebut yaitu (1) Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan dua tahun sebelum pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018 dan tahun 2019, serta dua tahun ketika terjadi pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020 dan tahun 2021, sehingga jumlah waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 tahun dan rentang waktu tersebut belum bisa memberikan pemahaman jangka panjang untuk mengamati dampak Pandemi Covid-19 terhadap PAD di Kota Surabaya, (2) Penelitian ini hanya difokuskan di Kota Surabaya, sehingga dampak Pandemi Covid-19 terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di daerah lain tidak bisa digambarkan atau dilakukan generalisasi dengan hasil di Kota Surabaya.

### **Saran**

Saran dalam penelitian ini dibagi menjadi saran praktis dan saran teoritis, saran praktis ditujukan kepada pemerintah Kota Surabaya dan saran teoritis ditujukan kepada peneliti selanjutnya, saran-saran tersebut dijabarkan sebagai berikut (1) Hasil menunjukkan bahwa

pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD Kota Surabaya karena struktur perolehan pajak yang tinggi di Kota Surabaya, sehingga disarankan kepada Bappeda dan Pemerintah Daerah Kota Surabaya umumnya agar mengupayakan peningkatan penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, (2) Pada penelitian hanya menggunakan Kota Surabaya sebagai fokus penelitian, sehingga disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas, misalnya tingkat provinsi atau nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. 2020. *Dampak Pandemi COVID-19 Bagi UMKM Serta Strategi E-Marketing UMKM di Indonesia*. <http://repository.uinsu.ac.id/10168/>
- Amani, T. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. [http://repository.upm.ac.id/2568/1/Buku Digital - Akuntansi Sektor Publik\\_compressed.pdf](http://repository.upm.ac.id/2568/1/Buku%20Digital%20-%20Akuntansi%20Sektor%20Publik_compressed.pdf)
- Aprilia, I. 2019. *Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/33905>
- BEKTI, S. 2018. *Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. <https://repository.unair.ac.id/74052/>
- IKRAITH-EKONOMIKA, L. M.-. 2021. undefined. (n.d.). *Memfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional*. *Journals.Upi-Yai.Ac.Id*. Retrieved January 7, 2023, from <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/download/1019/805>
- Inzaghi, D. 2020. *Hubungan Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Kontribusi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. [https:// repository.unair.ac.id/99510/](https://repository.unair.ac.id/99510/)
- Johannes, M. 2014. *Analisis efektivitas pajak hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya*. <http://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/3140/>
- Laila, A. 2022. *Pajak Hotel Untuk Mendukung Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya)*. [https:// repository.stiesia.ac.id/ id/ eprint/4944/1/BAB 1.pdf](https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/4944/1/BAB%201.pdf)
- Maharani, V. 2021. *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surabaya)*. <https://repository.unair.ac.id/112381/>
- Marlina, L., (E-Dj), S. S.-E. D. J. 2020. undefined. (n.d.). *Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19*. *Uit.e-Journal.Id*. Retrieved January 7, 2023, from <https://uit.e-journal.id/EDJ/article/view/910>
- Martani, D., dan FEUI, D. 2014. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. [http:// ocw.ui.ac.id/ pluginfile.php/208/mod\\_resource/content/0/AK2 Pertemuan 13 Pajak Penghasilan.pdf](http://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/208/mod_resource/content/0/AK2%20Pertemuan%2013%20Pajak%20Penghasilan.pdf)
- Meliala, T., Silitonga, N., dan Sinaga, T. 2007. *Akuntansi sektor publik*. [https:// repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1404/Tulis\\_140993-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1404/Tulis_140993-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Naimuni, M. 2021. *Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hotel Secara Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. [https:// repository.stiesia.ac.id/ id/eprint/4112/1/BAB 1.pdf](https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/4112/1/BAB%201.pdf)
- Nugraheni, A. P., Pramudyastuti, O. L., dan Sunaningsih, S. N. 2020. *Strategy of SMEs in the Covid-19 pandemic period*. *Journal.Stiejayakarta.Ac.Id*, 2(1). [http:// journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JAPJayakarta/article/view/45](http://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JAPJayakarta/article/view/45)
- Oktasa, A. 2020. *Pengaruh kunjungan wisata, umkm, restoran, dan hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Surabaya tahun 1989-2018*. [https:// erepository.uwks.ac.id/ 6018/1/ Daftar Isi.pdf](https://erepository.uwks.ac.id/6018/1/DAFTAR%20ISI.pdf)
- Pangestu, A. 2022. *Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya*. [https:// repository.stiesia.ac.id/ id/eprint/4941/2/BAB 1.pdf](https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/4941/2/BAB%201.pdf)

- Pramardika, R. 2017. *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2014-2016*. <https://repository.unair.ac.id/70940/>
- Prasetyaningtyas, V. 2022. *Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya*. [http:// repository.upnjatim.ac.id/6345/](http://repository.upnjatim.ac.id/6345/)
- Priyantono, L. 2021. *Analisis Penerapan Insentif Perpajakan Pengurangan Angsuran PPH Pasal 25 Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Pemulihan Cash Flow Pada PT X*. <https://repository.unair.ac.id/112046/>
- Putri, V., dan Ma'ruf, M. 2022. *Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020*. [https:// ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/49036](https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/49036)
- Renaningsih, M. 2015. *(Studi Deskriptif Tentang Keefektifan Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Setelah Dialihkan dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah* <https://repository.unair.ac.id/16079/>
- RIA, F. 2022. *Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya*. <https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/5238/1/PENDAHULUAN.pdf>
- Saputra, F., Terapan, H. A.-J. I. M. 2022. undefined. (n.d.). Penerapan Manajemen Poac: Pemulihan Ekonomi Serta Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 (Literature Review. *Dinastirev.Org*. Retrieved January 7, 2023, from [https:// dinastirev.org/JIMT/article/view/733](https://dinastirev.org/JIMT/article/view/733)
- Saputro, R. 2014. *(Pbb P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)*. [https:// www.academia.edu/download/52239701/43-153-1-PB1.pdf](https://www.academia.edu/download/52239701/43-153-1-PB1.pdf)
- Siregar, N. 2021. *Kebijakan Insentif Pajak Impor Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi Covid-19*. [http:// repository.lppm.unila.ac.id/30709/](http://repository.lppm.unila.ac.id/30709/)
- Sitepu, S. B. 2017. *Pengaruh Faktor internal terhadap keberhasilan start-up bisnis di kota surabaya*. <https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1230>
- Soetjipto, N. 2020. *Ketahanan UMKM Jawa Timur melintasi pandemi covid-19*. <http://repository.stieyapan.ac.id/id/eprint/73/>
- Sopannah, A., Fatoni, I., Danawanti, M., dan Harmadji, D. 2020. *Bunga rampai akuntansi publik: isu kontemporer akuntansi publik*. [https:// books.google.com/ books?hl= id&lr= &id=eyQJEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Akuntansi+ Sektor+ Publik+ &ots=ivmDkLNCwX&sig=IBv3KSwZp6Vve\\_1uLuzpdXNO90E](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=eyQJEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Akuntansi+ Sektor+ Publik+ &ots=ivmDkLNCwX&sig=IBv3KSwZp6Vve_1uLuzpdXNO90E)
- Sugiarto, S. 2019. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2013-2017*. [http:// repository.widyakartika.ac.id/id/eprint/790](http://repository.widyakartika.ac.id/id/eprint/790)
- Tarigan, V. 2022. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pajak Hiburan Dalam Pendapatan Anggaran Daerah di Kota Medan Tahun 2020-2021*. [https:// repositori.usu.ac.id/handle/123456789/57780](https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/57780)
- Tax, C. C.-J. P. I. Indonesian. 2020. undefined. (n.d.). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal.Pknstan.Ac.Id*. Retrieved January 7, 2023, from <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/821>
- Utomo, M., Akuntansi, B. W. 2017. undefined. (n.d.). Pengaruh Retribusi Pasar Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Surabaya. *Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id*. Retrieved January 7, 2023, from <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/JEB17/article/view/1105>
- Wijoyo, H. 2021. *Strategi Pemasaran UMKM di masa pandemi*. [https:// books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ZPgkEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pandemi+covid+19+%22strategi+umkm%22&ots=DLSf-x2gxU&sig=GkVtcfMlsl9e7vnIpLnBY7Yh1-8](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ZPgkEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pandemi+covid+19+%22strategi+umkm%22&ots=DLSf-x2gxU&sig=GkVtcfMlsl9e7vnIpLnBY7Yh1-8)